

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan pembahasan terhadap ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2014 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tipologi Klassen, daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dapat diklasifikasikan berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita menjadi empat kelompok yaitu:
 - a. Daerah yang berada di Kuadran I (daerah maju dan cepat tumbuh) yakni; Kabupaten Lima Puluh Kota; Kota Solok; Kota Padang Panjang; dan Kota Bukittinggi.
 - b. Daerah yang berada di Kuadran II (daerah maju tapi tertekan) yakni; Kota Padang; Kota Sawahlunto; dan Kota Pariaman
 - c. Daerah yang berada di Kuadran III (daerah berkembang) yakni; Kabupaten Padang Pariaman; Kab. Agam; Kab. Solok; Kab. Dharmaraya; Kab. Pasaman Barat; dan Kota Payakumbuh.
 - d. Daerah yang berada di Kuadran IV (daerah relatif tertinggal) yakni; Kab. Kepulauan Mentawai; Kab. Pesisir Selatan; Kab. Sijunjung; Kab. Tanah Datar; Kab. Pasaman; dan Kab. Solok Selatan.

Dari analisa Tipologi Klassen tersebut, bisa juga kita pahami ternyata daerah kota sudah lebih baik dari pada daerah kabupaten, terbukti tidak ada satupun daerah

Kota di Sumatera Barat yang berada di Kuadran IV. Hal ini mungkin disebabkan perbedaan struktur ekonomi antara daerah kota dan kabupaten.

2. Pada periode pengamatan tahun 2005-2014 terjadi penurunan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan analisis dengan Indeks Williamson. Tingkat ketimpangan antar kota lebih tinggi dari pada tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten.
3. Secara simultan, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan tingkat pengangguran berpengaruh secara bersama-sama terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Pengeluaran pemerintah memiliki efek secara signifikan untuk penurunan nilai ketimpangan di Sumatera Barat, sementara itu tingkat pengangguran berpengaruh signifikan untuk meningkatkan angka ketimpangan di Provinsi Sumatera Barat. Investasi swasta berpengaruh untuk mengurangi ketimpangan di Sumatera Barat namun tidak signifikan pengaruhnya.
4. Alokasi investasi swasta di kabupaten/kota Sumatera Barat yang tidak merata menjadi penyebab tingkat investasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Alokasi dana pembangunan melalui belanja langsung membuktikan bahwa salah satu cara mengurangi tingkat ketimpangan adalah dengan pengeluaran pemerintah (investasi pemerintah yang efektif). Tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Provinsi Sumatera Barat menjadi penyebab meningkatnya ketimpangan ekonomi.
5. Nilai R^2 sebesar 0,5204 artinya variasi variabel ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan oleh variabel investai

swasta, pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran sebesar 52 % sedangkan sisanya 48 % dipengaruhi oleh faktor diluar model.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka terdapat beberapa keterbatasan baik secara teknis maupun secara teoritis dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Analisis regresi hanya melihat ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat secara umum, namun tidak meregresi antar kabupaten dan antar kota.
- b. Dalam penelitian ini, objek penelitian mengenai tipologi klassen hanya melihat perkembangan kabupaten/kota rata-rata selama 10 tahun.
- c. Dalam penelitian ini, nilai indeks Williamson diasumsikan konstan untuk setiap kabupaten/kota.
- d. Jumlah variabel bebas dalam penelitian ini hanya mengkaji 3 variabel saja, sehingga masih banyak kemungkinan variabel yang bisa ditambahkan kedepannya.

6.3 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan analisis regresi secara keseluruhan, baik regresi kab/kota (tingkat provinsi), regresi antar kota, dan regresi antar kabupaten.
- b. Untuk Tipologi Klassen, diharapkan peneliti selanjutnya mampu melihat perubahan dan perkembangan tiap daerah kabupaten/kota Sumatera Barat

pertahunnya, sehingga jelas terlihat pergeseran antara daerah maju dan daerah terbelakang.

- c. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menambah variabel penelitian yang berkenaan dengan ketimpangan pembangunan ekonomi sehingga bisa menjelaskan lebih kongkrit mengapa ketimpangan itu selalu ada.

